

KARAKTERISTIK KEHIDUPAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN, DAN KEBUDAYAAN PADA MASA KERAJAAN CIREBON

A. Latar Belakang

Datang dan berkembangnya Islam di Indonesia mempunyai konsekuensi yang sangat besar dikarenakan mampu menjadikan Islam menjadi agama dengan penganut terbanyak di Indonesia. Penyebaran, dan pengajaran Islam di Indonesia dilakukan dengan cara yang relatif damai dan mampu diterima dengan baik. Islam dibawa melalui perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Arab, Cina, Persia dan India. Berawal dari jalur perdagangan, Islam kemudian menyebar lebih luas lagi melalui perkawinan, dakwah, pendidikan, kesenian, dan politik (Ningsih, 2021).

Hasil dari penyebaran Islam di Indonesia terutama penyebaran di bidang politik menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. kerajaan-kerajaan ini memiliki peranan penting dalam menyebarkan dan menjadi komponen penting dalam pembentukan budaya Islam dalam masyarakat Indonesia. Beberapa daerah penting yang menjadi tempat berkembangnya Islam dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia adalah daerah Sumatera dan pesisir utara Jawa (Maulia et al., 2022).

Salah satu daerah di pesisir utara Jawa yang menjadi salah satu tempat penting dalam perkembangan Islam di Indonesia adalah Cirebon. Cirebon adalah daerah yang multikultural, berada di antara wilayah kebudayaan Sunda dan Jawa. Cirebon juga merupakan wilayah yang strategis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan. Cirebon sebagai sebuah wilayah geografis banyak dikaitkan dengan berdirinya salah satu pusat kekuasaan politik pada masa penyebaran Islam yaitu Kerajaan Cirebon (Dienaputra et al., 2021).

Kerajaan Cirebon sebagai kerajaan di Indonesia di zaman Islam tentunya mempunyai keunikannya tersendiri sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia pada masa itu. Pembahasan tentang Kerajaan Cirebon dan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaannya dapat memberikan gambaran

mengenai bagaimana tumbuhnya pemerintahan dan masyarakat yang bercorak Islam di Nusantara.

Dalam hal ini juga penting untuk membahas bagaimana kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya serta penyebab kemunduran Kerajaan Cirebon untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan suatu kerajaan dan dampaknya kepada masyarakat. Pembahasan mengenai karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan pada masa Kerajaan Cirebon juga dapat memperdalam pengetahuan pembaca tentang sejarah Indonesia dan menunjukkan bahwa terdapat sebuah kerajaan Islam yang berada di antara kebudayaan Sunda dan Jawa. Oleh karena itu makalah ini akan membahas tentang karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan pada masa Kerajaan Cirebon.

B. Letak dan Awal Berdirinya Kerajaan Cirebon

Letak Kerajaan Cirebon

Kerajaan Cirebon terletak pada pesisir utara Pulau Jawa dengan pusat pemerintahan yang terletak di Kota Cirebon. Letak geografis Kota Cirebon yang berada di pesisir membuat Kota Cirebon menjadi kota pelabuhan dan perdagangan. Menurut catatan penjelajah Portugis yang bernama Tome Pires, Cirebon adalah sebuah kota dengan pelabuhan yang indah dan terdapat empat sampai lima kapal yang berlabuh di sana. Kota Cirebon adalah pusat perdagangan dan pelabuhan di wilayah pesisir timur Jawa Barat dan menjadi pertemuan antara budaya Jawa dan Sunda (Adeng et al., 1998)

Pada awalnya, daerah Cirebon bernama Tegal Alang-Alang, kemudian daerah tersebut dikenal dengan nama Lemah Wungkuk. Setelah itu di daerah tersebut dibangun sebuah pedukuhan oleh Raden Walangsungsang/Pangeran Cakrabuana dan diubah namanya menjadi Caruban. Pada perkembangan di masa-masa selanjutnya, Caruban berubah nama menjadi Cirebon karena kebiasaan masyarakat yang saat itu banyak yang berprofesi sebagai nelayan yang sering membuat terasi udang dan petis, dan salah satu bahan dasar makanan tersebut adalah air rebusan udang yang dinamakan *cai rebon* (Hardhi, 2014).

Awal Pendirian Kerajaan Cirebon

Sejarah berdirinya Kerajaan Cirebon tidak lepas dari tokoh terpentingnya yaitu Syarif Hidayatullah (1448–1568) atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Beliau lahir pada tahun 1448 M. Ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah yang merupakan penguasa Mesir dan ibunya bernama Nyai Rara Santang yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi dari Pakuan Pajajaran. Syarif Hidayatullah menghabiskan masa kecilnya di Arab untuk mempelajari ilmu agama (Fauziyah, 2015).

Syarif Hidayatullah adalah putra sultan yang berhak atas tahtanya di Mesir, tetapi Syarif Hidayatullah lebih memilih tinggal di tanah Jawa sebagai tanah leluhur ibunya dan menyebarkan Islam disana. Syarif Hidayatullah singgah di Pasai sebelum bertolak ke tanah Jawa tepatnya di Banten. Di Banten, beliau melihat bahwa agama Islam telah berkembang sebagai hasil dakwah dari Sunan Ampel. Kenyataan ini mendorong Syarif Hidayatullah berguru kepada Sunan Ampel. Dari hasil bergurunya, Sunan Gunung Jati mendapat tugas untuk mengembangkan Islam di daerah Cirebon. Tugas ini dilaksanakan pada 1470, waktu dirinya berusia 22 tahun. Disini Syarif Hidayatullah mendapat gelar Maulana Jati atau Syekh Jati (Fauziyah, 2015).

Pada saat itu Cirebon dikuasai oleh Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana adalah anak dari Prabu Siliwangi dan merupakan kakak dari Nyai Rara Santang, yang berarti Sunan Gunung Jati adalah keponakannya. Pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana memberikan kekuasaan Cirebon kepada Sunan Gunung Jati dan mengangkatnya sebagai Sultan Cirebon dengan gelar *Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panata Agama Aulya Allah Kutubijaman Kolifaturrasulullah S.A.W.* Pangeran Cakrabuana juga memberikan gelar Sunan Gunung Jati sebagai Wali Kutub, artinya penyebaran Sunan Gunung Jati tidak hanya di Cirebon, melainkan diseluruh tanah Pasundan bahkan Nusantara (Hardhi, 2014).

Salah satu tindakan politik yang pertama kali dilakukan oleh Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Cirebon adalah menjalin hubungan dan mempererat persekutuan dengan Demak untuk memerdekakan diri dari kekuasaan Kerajaan

Sunda Pajajaran. Upaya tersebut berhasil dilakukan karena kekuatan Kerajaan Sunda yang sudah melemah dan terpecah-belah. Setelah itu Cirebon berhasil mendapatkan kedaulatan penuh atas rakyat dan wilayahnya sehingga mampu berkembang (Hermawan & Kusdiana, 2020).

C. Sistem Pemerintahan Kerajaan Cirebon

Sistem Pemerintahan dan Politik Kerajaan Cirebon

Sistem politik yang dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati didasarkan pada asas desentralisasi yang berpola kerajaan pesisir. Pelabuhan menjadi bagian yang sangat penting dengan pedalaman sebagai unsur penunjang yang vital. Strategi politik desentralisasi itu dilakukan dengan menerapkan program pemerintahan yang bertumpu pada intensitas pengembangan dakwah Islam ke seluruh wilayah bawahannya di tanah Sunda dengan didukung oleh perekonomian yang menitik-beratkan pada perdagangan dengan berbagai negara seperti Campa, Malaka, India, Cina, dan Arab. Untuk menunjang misi pemerintahannya itu, Sunan Gunung Jati mengisi personil jajaran pemerintahannya dengan para kerabatnya dan para ulama (Erwantoro, 2012).

Sunan Gunung Jati membentuk sistem dan struktur kenegaraan yang didasarkan pada paham kekuasaan religius. Adapun esensi dari paham kekuasaan religius adalah meletakkan kekuasaan politik pada karakter adiduniawi dan adimanusiawi. Menurut Moertono (1981: 26-27) sang pemimpin bukan lagi manusia biasa tetapi manusia yang memiliki kemampuan supranatural. Raja menjadi medium yang menghubungkan manusia (mikrokosmos) dengan alam gaib (makrokosmos). Dengan demikian, misi pemerintahan Sunan Gunung Jati bentuknya merupakan perpaduan antara sistem pengelolaan negara dengan dakwah agama Islam sehingga aspek-aspek pemerintahan, pengendalian masyarakat, dan pengembangan agama menyatu menjadi bagian yang tidak terpisahkan (Lubis, 2003).

Daftar Penguasa Kerajaan Cirebon

1. Sunan Gunung Jati

Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah lahir di Mekkah pada tahun 1448 M. Ia merupakan anak dari Syarif Abdullah dan Syarifah Mudaim atau Rara Santang. Kesultanan Cirebon didirikan setelah Sunan Gunung Jati menikahi Nyai Pakungwati, sepupunya yang merupakan anak dari Pangeran Cakrabuana atau Walangsungsang, untuk menjadi penguasa Cirebon. Sunan Gunung Jati, merupakan salah satu dari Wali Songo yang sukses dalam menjalankan peran sebagai pemimpin politik dan spiritual, sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika Islam dan kebijaksanaan tradisi lokal. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 M dan dimakamkan di Desa Astana, yang berjarak sekitar 3 kilometer di sebelah barat kota Cirebon, Jawa Barat. Ia wafat saat berusia 120 tahun (Hardhi, 2014).

2. Fatahillah

Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati meninggal dan dimakamkan di Gunung Sembung. Sebagai gantinya, Fatahillah menjadi penguasa resmi Cirebon setelah naik tahta. Fatahillah atau Fadhillah Khan berasal dari Pasai, sebuah wilayah di Aceh yang pada masa itu merupakan salah satu pusat Islamisasi, perdagangan, dan kekuasaan Islam di Sumatera. Dia adalah anak dari seorang ulama dan pejabat tinggi Pasai yang kemudian tinggal di Mekah selama beberapa tahun sebelum kembali ke tanah air dan memilih untuk menetap serta berdakwah di pulau Jawa (Ekadjati, 2018).

Fatahillah dipilih sebagai penguasa di Sunda Kelapa, yang kemudian berganti nama menjadi Jayakarta, pada tahun 1528. Pada tahun 1552, dia diangkat sebagai penguasa di Cirebon. Dia menikah dengan putri dari Demak dan juga dengan putri dari Cirebon, yang merupakan anak dari Sunan Gunung Djati. Fatahillah memimpin Cirebon hingga tahun 1570 Masehi, saat beliau meninggal. Setelah kematian Fatahillah, karena tidak ada pewaris lain yang tersedia, tahta kerajaan diwariskan kepada cucunya, Pangeran Emas atau Panembahan Ratu I, yang merupakan putra tertua Pangeran Dipati Carbon dan cicit Sunan Gunung Jati (Ekadjati, 2018).

3. Panembahan Ratu I

Setelah meninggalnya Fadhillah Khan, kendali atas Kerajaan Cirebon diambil oleh Pangeran Emas yang dikenal sebagai Panembahan Ratu I. Panembahan Ratu I memerintah Kerajaan Cirebon dari tahun 1570 hingga 1649 M. Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu I, Kerajaan Cirebon berada di antara dua kerajaan besar, yaitu Kesultanan Banten di barat dan Kerajaan Mataram di timur, sehingga Kerajaan Cirebon tidak dapat meluaskan wilayah kekuasaannya lebih lanjut. Dalam posisi ini, Kerajaan Cirebon berisiko untuk diserang oleh kedua kerajaan tersebut, namun Kesultanan Banten masih menghormati Kerajaan Cirebon karena merupakan tahta leluhurnya, Sunan Gunung Jati. Di sisi lain, Kerajaan Mataram menganggap Kerajaan Cirebon sebagai mentor dan tempat yang sakral, karena hubungan persahabatan dahulu antara Panembahan Senopati dan Panembahan Ratu I (Erwantoro, 2012).

Selama 79 tahun kepemimpinan Panembahan Ratu I, situasi di Cirebon sangat stabil, tanpa adanya insiden apapun. Ancaman dari Kerajaan Sunda terhadap eksistensi Kerajaan Cirebon sudah tidak ada lagi. Kesultanan Banten masih melihat Cirebon sebagai salah satu pilar utama dalam keberlangsungan Kesultanan Banten. Hubungan dengan Kerajaan Pajang juga berjalan lancar tanpa masalah. Keamanan pelabuhan-pelabuhan yang merupakan aset utama Kerajaan Cirebon menjaga transaksi masyarakatnya dan menyambut kedatangan kapal-kapal pedagang asing (Erwantoro, 2012).

4. Panembahan Ratu II

Setelah kematian Panembahan Ratu, kepemimpinan di Cirebon dialihkan kepada cucunya yang bernama Pangeran Rasmi dengan gelar Panembahan Adiningkusuma (Panembahan Ratu II). Setelah itu, Panembahan Ratu II lebih dikenal dengan nama Panembahan Girilaya. Penobatan Panembahan Ratu II mendapat sambutan baik dari Sunan Amangkurat I (Raja Mataram periode 1645-1677) karena Panembahan Ratu II adalah menantu dari Sunan Amangkurat I (Deviani, 2016). Tahun 1650, setelah penobatan Panembahan Ratu II sebagai raja Cirebon, Sunan Amangkurat I mendorongnya untuk menyerang Banten, setelah upaya diplomasi Mataram untuk menguasai Banten gagal. Namun, pasukan Cirebon berhasil dipukul mundur oleh pasukan Banten. Untuk memperkuat

pengaruhnya di Cirebon, Sunan Amangkurat I mengundang Panembahan Ratu II dan dua putranya, Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya, untuk berkunjung ke Keraton Mataram pada tahun yang sama. Namun, setelah tiba di sana, mereka tidak diizinkan kembali ke Cirebon. Panembahan Ratu II meninggal pada tahun 1662 Masehi dan dimakamkan di bukit Girilaya, dekat dengan kompleks pemakaman keluarga Kerajaan Mataram di Yogyakarta. Selama ditawan di Mataram, pemerintahan di Cirebon dijalankan oleh Pangeran Wangsakerta, putra Panembahan Girilaya (Deviani, 2016).

D. Kehidupan Sosial Ekonomi & Sosial Budaya Kerajaan Cirebon

Kehidupan Sosial Ekonomi Kerajaan Cirebon

Cirebon yang letaknya berada di wilayah pesisir mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat Cirebon sendiri. Perekonomian Cirebon didukung oleh ekonomi pesisir yang dihasilkan dari pelabuhan dan ekonomi pasar. Ekonomi pesisir memberikan pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat. Sejak masa pertumbuhannya, Cirebon sudah memiliki pelabuhan yang dipakai untuk berdagang dan keluarnya arus barang (Lapian & Sedyawati, 1996).

Perdagangan di pelabuhan Cirebon begitu ramai dikunjungi oleh para saudagar-saudagar dari Cina bahkan Eropa. Perekonomian yang terjalin sangat berkembang. Cina memegang peranan besar dalam transaksi perekonomian perdagangan ini terkait dengan jual beli barang dagangan baik dipergunakan oleh masyarakat pedesaan di dalam daerah maupun dalam dunia internasional. Kondisi masyarakat Cirebon berkembang pada waktu kerajaan. Sebelum adanya kolonialisasi dari pihak kolonial, bentuk wilayah Cirebon adalah kerajaan, dengan dikepalai oleh seorang Sultan. Pemerintahan kerajaan ini dipegang oleh 3 keraton. Pada kurun waktu 1649-1667 ketika Panembahan Girilaya berkuasa, wilayah Cirebon meliputi Kuningan, Majalengka, dan Indramayu (Lapian & Sedyawati, 1996).

Kehidupan Sosial Budaya Kerajaan Cirebon

Kerajaan Cirebon merupakan daerah yang multikultural sebagai persilangan antara budaya Jawa dan Sunda. Keberagaman penduduk Cirebon pada

perkembangannya menghadirkan pula keberagaman kebudayaan Cirebon. Keberagaman kebudayaan Cirebon tidak hanya ditandai oleh hadirnya kebudayaan asli Cirebon akan tetapi juga ditandai oleh hadirnya berbagai kebudayaan baru yang dibawa para pendatang serta berbagai kebudayaan baru, produk interaksi kebudayaan penduduk asli dengan kebudayaan penduduk pendatang. Produk budaya hasil multikulturalisme Kerajaan Cirebon berupa wayang kulit, seni batik, seni lukis kaca, dan tari topeng (Dienaputra et al., 2021).

Cirebon juga menjadi daerah islamisasi masif yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, dengan metode dakwah yang menggabungkan antara nilai kultural setempat dan tasawuf. Secara halus nilai-nilai Islam diajarkan Sunan Gunung Jati dengan keberagaman kultur yang ada di Cirebon sebelum Islam masuk. Sunan Gunung Jati mengajarkan empat tingkatan ibadah yaitu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat kedalam bentuk kesenian agar mudah merasuk di masyarakat. Secara sederhana untuk Syariat dilambangkan dengan wayang, yang mana wayangnya sebagai bentuk perwujudan dari pada Manusia dan dalangnya adalah simbol daripada Allah SWT; Tarekat di simbolkan dengan barong, hakekat di simbolkan dengan topeng; dan marifat disimbolkan dengan Ronggeng. Seperti yang kita tahu bahwa keempat kesenian yang di mengisyaratkan sebagai empat tahapan dalam Islam tadi adalah empat jenis pertunjukan seni masyarakat Cirebon (Hardhi, 2014).

E. Kemunduran Kerajaan Cirebon

Pada tahun 1568 sunan gunung jati meninggal dunia, roda pemerintahan kesultanan Cirebon dijalankan oleh Fadillah Khan sampai ia meninggal pada tahun 1570. Setelah itu, yang naik tahta adalah cicit sunan gunung jati yang bernama Pangeran Emas putra Pangeran Swarga Dipati Carbon dari perkawinan dengan Nhay Mas Ratu Manawi Raras, Putri Fadillah Khan. Pangeran emas kemudian bergelar Panembahana Ratu I, ia memerintah kesultanan Cirebon selama 1570 sampai 1649 M. pada masa ini Cirebon tidak terjadi masalah apapun, hal yang demikian itu terjadi karena kondisi Cirebon pada masa itu sangat kondusif (Sunardjo, 1996).

Sepeninggalan Panembahan I pada 1649, kedudukannya sebagai kepala pemerintahan Cirebon digantikan oleh cucunya yang bernama Pangeran Putra atau

disebut juga Raden Rasmi dan bergelar Panembahan Adiningkusuma atau bergelar Panembahan Ratu II. Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II Cirebon mulai mengalami masalah dalam bidang politik. Raja Mataram yaitu Amangkurat I yang juga mertuanya meminta agar Panembahan Ratu II membujuk Banten untuk bersahabat dengan Mataram dan mau menghentikan serangannya terhadap Belanda. Panembahan Ratu II tidak mau menuruti kemauan Amangkurat I. Ia beberapa kali berkunjung ke Banten untuk membujuk Sultan Ageng Tirtayasa agar mau bergabung dengan Mataram dan menghentikan serangan ke Belanda, tetapi usahanya selalu gagal. Bahkan Sultan Ageng Tirtayasa mengajaknya untuk bergabung dengan Banten daripada Mataram. Sultan Ageng Tirtayasa juga memperingatkan bahwa Mataram dapat mengancam kedaulatan Cirebon (Sunardjo, 1996).

Kegagalan Panembahan Ratu II dalam membujuk Banten membawa akibat fatal. Amangkurat I merasa kecewa dan menganggap Panembahan Ratu II telah bersekutu dengan Banten. Karena itulah pada tahun 1662 Amangkurat I mengundang Panembahan Ratu II ke Mataram untuk menghadiri upacara penghormatan. Tentu Panembahan Ratu II tidak menolaknya, ia bersama kedua putranya yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya datang ke Mataram. Sesampainya di Mataram dan setelah selesai upacara penghormatan, Panembahan Ratu II beserta kedua anaknya tidak diperbolehkan pulang. Rupanya undangan tersebut tidak semata dimaksudkan sebagai penghormatan tetapi juga sebagai pertanggungjawaban Panembahan Ratu II yang gagal melaksanakan misi Mataram. Di Mataram Panembahan Ratu II dengan kedua putranya menjadi tahanan politik meskipun demikian Panembahan Ratu II tetap diakui sebagai Raja Cirebon (Lubis, 2003).

Selama Panembahan Ratu II dan kedua putranya ditahan di Mataram. Pemerintahan Cirebon dipegang oleh putra ketiganya yaitu Pangeran Wangsakerta. Dalam menjalankan roda pemerintahannya Pangeran Wangsakerta selalu diawasi secara ketat oleh orang-orang Mataram yang ditugaskan oleh Susuhunan Amangkurat I. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Cirebon sudah kehilangan kedaulatannya. Apa yang dikatakan oleh Sultan Ageng Tirtayasa kepada Panembahan Ratu II menjadi sebuah kenyataan. Selama bertahun-tahun mereka tinggal di Mataram, sampai akhirnya pada tahun 1667 Panembahan Ratu II meninggal dunia dan dimakamkan

di Girilaya. Sejak saat itu Panembahan Ratu II sering disebut dengan Panembahan Girilaya (Ekadjati, 2018).

F. Rangkuman

Kerajaan Cirebon, terletak di pesisir utara Pulau Jawa, merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan yang strategis. Cirebon didirikan oleh Raden Walangsungsang dan menjadi pusat perdagangan karena profesi nelayan yang membuat terasi udang yang disebut "cai rebon". Kerajaan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati, yang menggabungkan Islam dengan sistem politik berbasis kekuasaan religius. Desentralisasi politiknya didukung oleh ekonomi perdagangan yang kuat, menjadikan pelabuhan sebagai elemen kunci, sementara penyebaran agama Islam disertai dengan pengembangan seni dan budaya menjadi bagian penting dari pemerintahannya.

Kehidupan sosial dan ekonomi di Kerajaan Cirebon didorong oleh aktivitas perdagangan di pelabuhan yang ramai, memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Keberagaman budaya juga menjadi ciri khas Cirebon, mencerminkan persilangan antara budaya Jawa dan Sunda, sementara seni dan kebudayaan berkembang sebagai hasil dari interaksi antara berbagai kelompok masyarakat dan agama yang ada di wilayah tersebut. Namun, kemunduran terjadi setelah kepemimpinan Panembahan Ratu II, yang mengalami konflik politik dengan Mataram dan Banten, menyebabkan penurunan kedaulatan dan stabilitas Kerajaan Cirebon.

G. Latihan

Kerjakan latihan berikut ini!

1. Dimana letak Kerajaan Cirebon dan bagaimana sejarah awal pendiriannya?
2. Bagaimana sistem pemerintahan Kerajaan Cirebon?
3. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya Kerajaan Cirebon?
4. Bagaimana sejarah kemunduran Kerajaan Cirebon?

H. Rujukan

- Adeng, Kuswiyah, W., Wiryono, H., & Erwantoro, H. (1998). *KOTA DAGANG CIREBON SEBAGAI BANDAR JALUR SUTERA*. (S. Rahardjo, Penyunt.) Jakarta: DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUOAYAAN RI.
- Deviani, T. (2016). Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Politik Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681-1755 M). *TAMADDUN, IV*(1), 123-146.
- Dienaputra, R. D., Yuniadi, A., & Yuliawati, S. (2021). Multikulturalisme Kebudayaan Daerah Cirebon. *Jurnal Panggung, XXXI*(2), 250-262.
- Ekadjati, E. S. (2018). Fatahillah sebagai Tokoh Historis: Sama atau Bedakah dengan Sunan Gunung Djati? *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia, III*(2), 117-124.
- Erwantoro, H. (2012). SEJARAH SINGKAT KERAJAAN CIREBON. *Patanjala, IV*(1), 170-183.
- Fauziyah, S. (2015). KIPRAH SUNAN GUNUNG JATI DALAM MEMBANGUN KEKUATAN POLITIK ISLAM DI JAWA BARAT. *Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya, XIII*(1), 85-98.
- Hardhi, T. R. (2014). DAKWAH SUNAN GUNUNG JATI DALAM PROSES ISLAMISASI DI KESULTANAN CIREBON TAHUN 1479-1568. *PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA*.
- Hermawan, W., & Kusdiana, A. (2020). *BIOGRAFI SUNAN GUNUNG DJATI: Sang Penata Agama di Tanah Sunda*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung .
- Lapian, A., & Sedyawati, E. (1996). *Kajian Cirebon dan Kajian Jalur Sutra, dalam "Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah dan Diskusi Ilmiah"*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Lubis, N. H. (2003). *Sejarah tatar Sunda*. Bandung: Satya Historika.

- Maulia, S. T., Hendra, & Ichsan, M. (2022). JEJAK PERKEMBANGAN ISLAM PADA KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP UNJA*, II(2), 77-84.
- Ningsih, R. (2021). KEDATANGAN DAN PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA. *Forum Ilmiah*, XVIII(2), 212-227.
- Sunardjo, R. H. (1996). *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cirebon 1479-1809*. Bandung: Tarsito.